

DISERTASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

***IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY IN THE IMPLEMENTATION OF
COMPULSORY 9 YEARS BASIC EDUCATION IN SERANG CITY
BANTEN PROVINCE***

Dengan Wibawa Rektor
Disertasi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan
Pada Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Yang Dipertahankan pada tanggal 06 Juni 2018



Oleh:

**Milwan
NIM: DIP.02.102**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
JATINANGOR
TAHUN 2018**

DISERTASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

**IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY IN THE IMPLEMENTATION OF
COMPULSORY 9 YEARS BASIC EDUCATION IN SERANG CITY
BANTEN PROVINCE**

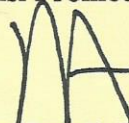
Dengan Wibawa Rektor
Disertasi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan
Pada Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Yang Dipertahankan pada tanggal 06 Juni 2018

Oleh

Milwan
NIM: DIP.02.102

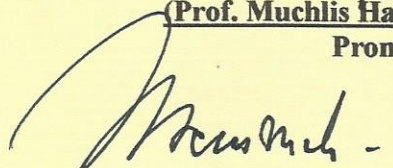
Telah Disetujui Oleh Tim Promotor
Pada Tanggal, 06 Juni 2018

Komisi Promotor,



(Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.)

Promotor



(Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA.)

Co-Promotor



(Prof. Dr. Juntika, M.Pd.)

Co-Promotor

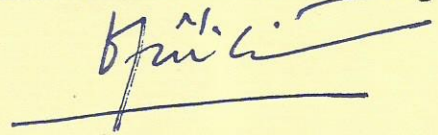
Mengetahui:

Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri



(Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S.)

Direktur Program Pascasarjana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri



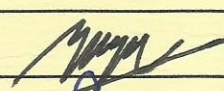

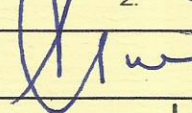
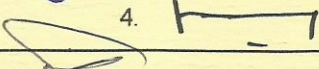

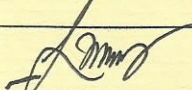
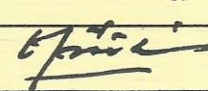
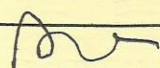
(Dr. Sampara Lukman, MA.)

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (REVISI)
UJIAN SIDANG TERBUKA DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN (S3)**

NAMA MAHASISWA : MILWAN
 N I M : DIP.02.102
 TANGGAL UJIAN SIDANG : 06 JUNI 2018
 PROGRAM STUDI : DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
 JUDUL PENELITIAN :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB
 PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

TELAH DIREVISI, DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI/PENELAHAH DAN KOMISI PROMOTOR

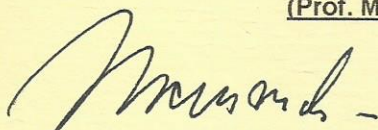
NO	PENGUJI/PENELAHAH	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS.	1. 
2.	Prof. Dr. Khasan Effendy, M.Pd.	2. 
3.	Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS.	3. 
4.	Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, MH.	4. 
5.	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	5. 
6.	Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA.	6. 
7.	Dr. Sampara Lukman, MA.	7. 
8.	Dr. Ika Sartika, MT.	8. 

Jatinangor, Juli 2018

Mengetahui/Menyetujui
Komisi Promotor,



(Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.)
Promotor



(Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA.)
Co-Promotor



(Prof. Dr. Juntika, M.Pd.)
Co-Promotor

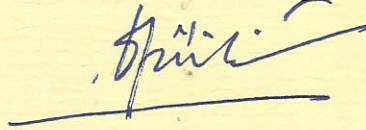
Mengetahui:

Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri



(Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S.)

Direktur Program Pascasarjana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri



(Dr. Sampara Lukman, MA.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Doktor Ilmu Pemerintahan, baik di Institut Pemerintahan Dalam Negeri maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak-benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jatinangor, 18 Juli 2018
Yang membuat pernyataan,



Milwan, S.Sos., M.Si.
NIM DIP.02. 102.

DALIL DISERTASI

1. Keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar (Wajar) 9 tahun ditentukan oleh komitmen dan konsistensi dukungan dari para pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan, serta perilaku sasaran wajar 9 tahun.
2. Koordinasi dan kerjasama yang intensif serta efektif antar para pelaksana kebijakan Wajar 9 tahun berpengaruh terhadap hasil implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun.
3. Kapasitas kelembagaan (pelaksana kebijakan) berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun.
4. Ketersediaan dan kelengkapan SOP berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
5. Faktor aksesibilitas, partisipasi aktif dari stakeholders dan masyarakat daerah yang terkena dampak kebijakan menentukan kualitas kebijakan daerah.
6. Ketersediaan sumber daya (ketersediaan pelaksana, dana, sarpras, informasi dan teknologi) dari sisi kuantitas dan kualitas berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
7. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi pendidikan.
8. Rendahnya tingkat pendidikan suatu daerah berpengaruh terhadap rendahnya peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) daerah bersangkutan.
9. Otonomi pendidikan dan komitmen kepala daerah berpengaruh pada kualitas pendidikan suatu daerah.
10. Pencapaian tujuan suatu kebijakan dipengaruhi oleh proses implementasi kebijakan yang bersangkutan.
11. Organisasi/lembaga pendidikan yang secara konsisten dan berkesinambungan menerapkan sistem manajemen mutu dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pada peserta didik.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

Oleh:
Milwan
NIM: DIP.02.102

Tim Promotor:
Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.
Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA.
Prof. Dr. Juntika, M.Pd.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang tahun 2014-2016 dilihat dari dimensi dan determinan implementasi kebijakan publik. Teori yang dijadikan acuan utama dalam penelitian ini yaitu teori tentang implementasi kebijakan yang menampilkan dua hal utama yaitu dimensi dan determinan. Metode penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian kualitatif (studi kasus). Penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive dan snowball. Tehnik pengumpul data melalui wawancara mendalam, observasi, dan teknik dokumentasi. Adapun hasil penelitian: 1) implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang tahun 2014-2016 belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakannya, yang tampak terlihat berupa hambatan: a) Dimensi kinerja implementasi kebijakan yaitu sosialisasi target program dan kerjasama antar organisasi masih rendah sehingga APK dan APM belum mencapai target. b) Dimensi linearitas yaitu masalah ketersediaan dan kelengkapan SOP yang berpihak pada kebutuhan masyarakat tidak tersedia lengkap. c) Dimensi efisiensi yaitu ketersediaan sumber daya di bawah standar. 2) determinan yang mempengaruhi ketidakkeberhasilan dari implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang Tahun 2014-2016: a) faktor substansi kebijakan: tidak ada kejelasan tentang ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang dan belum ada Peraturan Walikota yang mengatur lebih lanjut tentang pendidikan dasar. b) faktor perilaku tugas pelaksana kebijakan : komitmen, tingkat kinerja, kompetensi, dan ketaatan petugas pelaksana terhadap SOP masih rendah. c) faktor interaksi jejaring kerja antar organisasi pelaksana: komunikasi dan interaksi jejaring kerja antar organisasi pelaksana belum memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang media sosial. d) faktor partisipasi kelompok sasaran: partisipasi masyarakat sasaran dan stake holders masih rendah (jumlah angka putus sekolah masih cukup tinggi). e) faktor ketersediaan dana, pelaksana, peralatan, informasi dan

teknologi belum cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Adapun kontribusi keilmuan dari hasil penelitian ini yaitu menghasilkan model baru implementasi kebijakan yaitu Model Kinerja Implementasi Kebijakan (KIK).

Keywords: kebijakan pendidikan, dimensi kebijakan, determinan kebijakan, wajib belajar

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY IN THE IMPLEMENTATION OF COMPULSORY 9 YEARS BASIC EDUCATION IN SERANG CITY BANTEN PROVINCE

By:
Milwan
NIM: DIP.02.102

Promotor Team:
Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.
Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA.
Prof. Dr. Juntika, M.Pd.

The problem in this research is how is the implementation of compulsory 9 years basic education policy in Serang City 2014-2016 seen from dimension and determinant of public policy implementation. Theory that used as the main reference in this research is the theory of policy implementation which presents two main things namely dimension and determinant. The research method used is qualitative research design (case study). Determination of informants, researchers using purposive and snowball techniques. Data collecting techniques through in-depth interviews, observation, and documentation techniques. The results of the research: 1) the implementation of compulsory 9 years basic education policy in Serang City 2014-2016 has not been run in accordance with the policy objectives, which appear to be seen as a barrier: a) The performance dimension of policy implementation, socialization of program targets and cooperation among organizations is still low APK and APM have not reached the target. b) The linearity dimension is the problem of availability and completeness of SOP in favor of the needs of the community is not available fully. c) Dimensional efficiency is the availability of resources below the standard. 2) determinants affecting the non-success of the implementation of compulsory 9 years basic education policy in Serang City 2014-2016: a) the policy substance factor: there is no clarity about basic measures and mandatory 9 years compulsory education policy objectives in Serang City and there is no Mayor Regulation that regulates further on basic education. b) behavioral factors of policy implementing tasks: commitment, level of performance, competence, and compliance of the executing officer to SOP is still low. c) the interaction factor of networks among implementing organizations: communication and interaction of networks between implementing organizations have not utilized technological progress in the field of social media. d) target group participation factor: target community participation and stake holders are still low (the number of drop out rates is still high enough). e) factors availability of funds, implementers, equipment, information and

technology is not good enough in terms of quantity and quality. The scientific contribution of the results of this study is to produce a new model of policy implementation that is performance model of policy implementation.

Keywords: education policy, policy dimensions, policy determinants, compulsory education

ABSTRAK DISERTASI

1. Judul Disertasi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota Serang Provinsi Banten
2. Subjek : 1. Implementasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan
2. Wajib pendidikan dasar 9 tahun Kota Serang
3. Dimensi implementasi kebijakan
4. Determinan implementasi kebijakan
5. Program Studi : Doktor Ilmu Pemerintahan
6. Konsentrasi : Kebijakan Publik
7. Tim Promotor : 1. Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.
2. Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA.
3. Prof. Dr. Juntika, M.Pd.
8. Tahun Kelulusan :
9. Abstrak :

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang belum dapat mewujudkan tujuan kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun, dilihat dari dimensi dan determinan implementasi kebijakan publik. Teori yang dijadikan acuan utama dalam penelitian ini yaitu teori Muchlis Hamdi (2014) tentang implementasi kebijakan yang menampilkan dua hal utama yaitu dimensi dan determinan. Metode penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian kualitatif (eksploratif); untuk menentukan key informan, peneliti menggunakan teknik purposive dan snowball; tehnik pengumpul data: wawancara mendalam, observasi, dan teknik dokumentasi. Adapun hasil penelitian, antara lain: 1) implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang tahun 2014-2016 belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakannya, yang tampak terlihat berupa hambatan: a) dari dimensi produktivitas yaitu sosialisasi target program yang rendah dan masalah ketersediaan dan keakuratan data program yang dibutuhkan.; b) dari dimensi linearitas yaitu masalah ketersediaan dan kelengkapan SOP yang berpihak pada kebutuhan masyarakat tidak tersedia lengkap; c) dari dimensi efisiensi yaitu ketersediaan sumber daya di bawah standar; 2) determinan yang mempengaruhi ketidakkeberhasilan dari implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang Tahun 2014-2016: a) dari sisi substansi kebijakan:

tidak ada kejelasan tentang ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang dan belum dilengkapi dengan Peraturan Walikota yang mengatur lebih lanjut tentang pendidikan dasar, b) dari sisi perilaku tugas pelaksana kebijakan : komitmen, tingkat kinerja, kompetensi, dan ketaatan petugas pelaksana terhadap SOP masih kurang memuaskan, c) dari sisi interaksi jejaring kerja antar organisasi pelaksana: komunikasi dan interaksi jejaring kerja antar organisasi pelaksana belum memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang media sosial; d) dari sisi partisipasi kelompok sasaran: partisipasi masyarakat sasaran belum memuaskan (jumlah angka putus sekolah masih cukup tinggi); e) dari sisi ketersediaan pelaksana, peralatan, informasi dan teknologi belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Teori Hamdi (2014) relevan dijadikan acuan implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang, namun perlu ada penambahan indikator baik untuk dimensi maupun determinannya. Adapun kontribusi keilmuan dari hasil penelitian ini yaitu menghasilkan model teoretis baru implementasi kebijakan yang selalu menampilkan dimensi dan determinan secara bersamaan.

Keywords: implementasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan, wajib pendidikan dasar 9 tahun, dimensi dan determinan implementasi kebijakan

10. Abstract

:

The problem in this research is why the implementation of compulsory 9 years basic education policy in Serang City has not been able to realize the compulsory policy objective of 9 years basic education, seen from the dimension and determinant of public policy implementation. The main reference theory in this research is Muchlis Hamdi's theory (2014) about policy implementation which shows two main things, namely dimension and determinant. The research method used is qualitative research design (explorative); to determine key informants, researchers used purposive and snowball techniques; data collecting techniques: in-depth interviews, observation, and documentation techniques. The results of the research, among others: 1) the implementation of compulsory 9 years basic education policy in Serang City 2014-2016 has not been run in accordance with the policy objectives, which looks like a barrier: a) from the dimensions of productivity that is the socialization of low program targets and availability issues and the accuracy of program data required; b) from the linearity dimension that is the problem of availability and completeness of SOP in favor of the needs of the community is not available fully; c) from the dimension of efficiency ie the availability of substandard resources; 2) determinants that affect the non-success of the implementation of compulsory basic education policy 9 years in Serang City 2014-2016 years: a) in terms of the substance of the policy: there is no clarity about the basic measures and objectives of compulsory 9 years basic education

policy in Serang City and not yet equipped with Mayor Regulations that further regulate basic education; b) in terms of behavior of policy implementers : the commitment, the level of performance, competence, and the compliance of the executing officers to the SOP are still unsatisfactory; c) from the interaction side of the network among implementing organizations: communication and interaction between the implementing organizations have not utilized technological progress in social media; d) in terms of participation of target kelepok: target community participation is not satisfactory (number of drop out rate still high enough); e) in terms of availability of implementers, equipment, information and technology has not been adequate both in terms of quantity and quality. Hamdi theory (2014) is relevant as the reference for the implementation of compulsory 9 years basic education policy in Serang City, but there needs to be additional indicators for both dimensions and determinants. The scientific contribution of the results of this study is to produce a new theoretical model of policy implementation that always displays dimensions and determinants simultaneously.

Keywords: implementation of government policy in the field of education, compulsory basic education 9 years, the dimensions and determinants of policy implementation

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah Nya maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan disertasi berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten Dalam Penyelenggaraan Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”.

Tujuan penulisan disertasi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang belum dapat mewujudkan tujuan kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun, dilihat dari dimensi dan determinan implementasi kebijakan publik. Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan model teoretis baru implementasi kebijakan yang selalu menampilkan dimensi dan determinan secara bersamaan.

Disertasi ini dapat diselesaikan karena kontribusi banyak pihak, baik pikiran, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan kepada pihak-pihak lain, secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Tim Promotor : Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D. (Ketua Tim Promotor), Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA dan Prof. Dr. Juntika, M.Pd (Anggota Tim Promotor) yang telah memotivasi, membimbing, memberikan inspirasi, memberikan arahan, pengayaan materi dan koreksi dengan teliti terhadap isi disertasi sehingga disertasi

ini menjadi lebih menarik dan berguna. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para Anggota Tim Penelaah yang telah memberikan berbagai masukan dan saran berharga bagi penyempurnaan disertasi ini, yaitu: Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, Prof. Dr. Khasan Effendy, M.Pd, Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS, Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, MH, Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si., Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, Dr. Sampara Lukman, MA, Dr. Ika Sartika, MT, dan Dr. Fernandes Simangunsong, M.Si.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada Rektor IPDN dan Direktur Program Pascasarjana IPDN, yang telah memberi kesempatan dan memfasilitasi penulis selama mengikuti pendidikan S3. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Menteri RISTEKDIKTI dan Rektor Universitas Terbuka yang telah mengirim dan membiayai penulis selama mengikuti pendidikan di IPDN.

Di samping itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua sumber data (para pelaksana kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun Kota Serang, pembuat kebijakan (Komisi 2 DPRD Kota Serang), dan BPS Kota Serang. Tanpa uluran tangan mereka, disertasi ini tidak akan pernah terwujud menjadi kenyataan. Walaupun demikian, tanggung jawab keseluruhan isi disertasi ini tentu saja tetap berada di tangan penulis.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda Enden Juana Juwita, istri tercinta Nur Samsiah, S.P, S.Pd, Ibu Mertua dan kedua putraku tersayang, Abiyyu Fayyadh dan Azmi Fawwaz, kelimanya telah memberikan dukungan sangat besar untuk kelancaran studi penulis, mulai dari memberi motivasi agar penulis cepat menyelesaikan studi dan selalu berdoa untuk kelancaran penulisan disertasi ini. Karena itu, kepada mereka berlima lah disertasi

ini penulis dedikasikan. “Tiada jarum yang tak patah”, begitu pula halnya dengan disertasi ini. Kritik konstruktif dari berbagai pihak, terutama dari para promotor dan penelaah guna menyempurnakan disertasi ini sangat penulis harapkan. Kiranya kehadiran disertasi ini akan berguna bagi kemajuan ilmu dan perbaikan implementasi kebijakan dalam berbagai bidang, khususnya bidang wajib pendidikan dasar 9 tahun.

Jatinangor, 18 Juli 2018

Milwan

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	iv
DALIL	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian	15
1.3 Pembatasan Masalah Penelitian	16
1.4 Rumusan Masalah Penelitian	18
1.5 Tujuan Penelitian	19
1.6 Manfaat Penelitian	19
BAB II. KERANGKA TEORI	21
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	25
2.2 Kajian Pustaka	30
2.2.1 Konsep Pemerintahan	30
2.2.2 Konsep Kebijakan Publik	36
2.2.3 Konsep Implementasi Kebijakan	41
2.2.4 Konsep Kinerja Implementasi Kebijakan (KIK)	78
2.2.5 Konsep Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	81
2.2.6 Konsep Pendidikan Dasar	87
2.3 Kerangka Pemikiran	95
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	97
3.1 Desain Penelitian	97
3.2 Kerangka Konseptual Penelitian	100
3.2.1 Definisi Konsep	100
3.2.2 Definisi Operasional	101
3.3 Data Yang Diperlukan	103
3.4 Informan dan Cara Menentukannya	106

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	109
3.6 Teknik Analisa Data	112
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	116
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	117
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang	117
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	117
4.1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dindikbud Kota Serang	123
4.2 Implementasi Kebijakan Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kota Serang	126
4.2.1 Dimensi Implementasi Kebijakan Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kota Serang	128
4.2.1.1 Dimensi Produktivitas	128
4.2.1.2 Dimensi Linearitas	138
4.2.1.2 Dimensi Efisiensi	142
4.2.2 Determinan Implementasi Kebijakan Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kota Serang	146
4.2.2.1 Determinan Substansi Kebijakan	146
4.2.2.2 Determinan Perilaku Tugas Pelaksana Kebijakan	154
4.2.2.3 Determinan Interaksi Jejaring Kerja	162
4.2.2.4 Determinan Partisipasi Kelompok Sasaran	171
4.2.2.5 Determinan Sumber Daya	176
4.2.2.5 Determinan Ekonomi, Sosial, dan Politik	182
4.3 Model Kinerja Implementasi Kebijakan (KIK)	185
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	192
5.1 Simpulan	192
5.2 Saran	194
DAFTAR PUSTAKA	197
LAMPIRAN	204

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.1 Target dan Capaian APK dan APM wajib pendidikan dasar 9 tahun Kota Serang tiga tahun terakhir (2014-2016)	9
Tabel 1.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kelompok Umur Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Kota-Kota se-Provinsi Banten Tahun 2014-2016	10
Tabel 1.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Kelompok Umur Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Kota-Kota se-Provinsi Banten Tahun 2014-2016	10
Tabel 2.2.3.1 Indikator Implementasi Kebijakan	74
Tabel 2.2.3.2 Determinan Implementasi Kebijakan Publik	75
Tabel 2.2.5 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014	86
Tabel 3.2.2 Definisi Operasional Dimensi Dan Determinan Implementasi Kebijakan Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kota Serang	102
Tabel 3.3 Data Yang Diperlukan Dalam Penelitian	103
Tabel 3.4. Informan Penelitian Dan Alasan Pemilihannya	106
Tabel 3.7 Jadwal Penelitian Disertasi	116
Tabel 4.1.1.1 Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan	117
Tabel 4.1.1.2 Jumlah Penduduk Kota Serang Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2016	120
Tabel 4.1.1.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama	123
Tabel 4.2.1.1.a. Target dan Realisasi Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Kota Serang Tiga Tahun Terakhir Dalam RPJMD	129
Tabel 4.2.1.1.b. Target dan Capaian Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Kota Serang Dalam SPM Tahun 2014-2016	132

Tabel 4.2.1.1.c. Program Pembangunan Dan Kegiatan Dindikbud Kota Serang Tahun 2014 - 2016	135
Tabel 4.2.1.3. Jumlah Pegawai Pelaksana Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Kota Serang dari tahun 2014 – 2016	143
Tabel 4.2.2.5.1 Kondisi Sarana dan Prasarana Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Kota Serang tiga tahun terakhir (2014 – 2016)	179
Tabel 4.3 Perbedaan Model Implementasi Kebijakan Publik Edwards III, Van Meter & Van Horn, Merilee S. Grindle, Muchlis Hamdi dan Model Milwan	191

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.2.3.1 <i>Direct and Indirect Impacts on Implementation</i> (Edwards III, 1980:148)	56
Gambar 2.2.3.2 <i>A Model of the Policy Implementation Process</i> (Van Meter and Van Horn, 1975:463)	59
Gambar 2.2.3.3 <i>Implementation as a Political and Administrative Process</i> (Grindle, 1980:11)	65
Gambar 2.2.3.4 Dimensi dan Determinan Implementasi Kebijakan Publik (Hamdi, 2014:107)	72
Gambar 2.2.3.5 <i>Logical Frame Work Theory</i> Implementasi Kebijakan Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Kota Serang (Sumber: Diolah dari berbagai referensi)	77
Gambar 2.2.4 Kerangka Pikir Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan	79
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kota Serang	96
Gambar 3.4 <i>Snowball Informan</i> Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun Kota Serang	109
Gambar 3.6. Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif (Creswell, 2013:277)	115
Gambar 4.1.1.1 Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan (Sumber: BPS Kota Serang, 2017)	121
Gambar 4.1.1.2 Komposisi Penduduk Kota Serang Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama (Sumber: BPS Kota Serang, 2017)	122
Gambar 4.3 Model Kinerja Implementasi Kebijakan (KIK)	186

DAFTAR SINGKATAN

AFTA: *ASEAN Free Trade Area*
APEC: *Asia Pacific Economic Cooperation*
APK: Angka Partisipasi Kasar
APM: Angka Partisipasi Murni
APS: Angka Partisipasi Sekolah
Asda: Asisten Daerah
BM: Beasiswa Miskin
BOSDA: Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BOSNAS: Bantuan Operasional Sekolah Nasional
BPS: Badan Pusat Statistik
BOS: Bantuan Operasional Sekolah
BSM: Bantuan Siswa Miskin
CSOs: *Civil society organizations*
Depdagri: Departemen Dalam Negeri
Dindikbud: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DPR: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EFA: *Education For All*
FGD: *focus group discussion*
HDI: *Human Development Index*
Inpres: Instruksi Presiden
IPTEK: ilmu pengetahuan dan teknologi
Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KIP: Kartu Indonesia Pintar
KOBAR: Kelompok Bermain
LKS: Lembar Kerja Siswa
LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat
Mendagri: Menteri Dalam Negeri
MTs: Madrasah Tsanawiyah
MI: Madrasah Ibtidaiyah
NKRI: Negara kesatuan Republik Indonesia
PAUD: Pendidikan Anak Usia Dini
Pemkot: Pemerintah Kota
Perda: Peraturan Daerah
Pemprov: Pemerintah Provinsi
Permendiknas: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Perwal: Peraturan Walikota
PNS: Pegawai Negeri Sipil
Pokja: kelompok kerja
PP: Peraturan Pemerintah
PPDB: Penerimaan Peserta Didik Baru
PT: Perguruan Tinggi
RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RT:Rukun Tetangga
RW:Rukun Warga
SATPAM:Satuan Pengamanan
SDM: sumber daya manusia
SD: Sekolah Dasar
SKB: Sanggar Kegiatan Belajar
SKPD: Satuan Kerja Pemerintahan Daerah
SLA: Sekolah Lanjutan Atas
SMP: Sekolah Menengah Pertama
SMA: Sekolah Menengah Atas
SMK: Sekolah Menengah Keguruan
SPM: Standar Pelayanan Minimum
SOP: Standar Operasional Prosedur
TFG: tunjangan fungsional guru
TPG: tunjangan profesi guru
TKC: Tim Koordinasi Kecamatan
Tupoksi: Tugas Pokok dan Fungsi
UN:Ujian Nasional
UPT: Unit Pelaksana Teknis
UU: Undang-Undang
UUD: Undang-Undang Dasar
WTO: *World Trade Organization*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara

Lampiran 2. Panduan Observasi dan Dokumentasi

Lampiran 3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Serang Tahun 2014 – 2018

Lampiran 4. Jumlah Siswa Baru SMP Sekota Serang Tahun 2016

Lampiran 5. Contoh Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 6. Resume Hasil Wawancara

Lampiran 7. Struktur Organisasi Dindikbud Kota Serang

Lampiran 8. Ijin Penelitian

Lampiran 9. SOP Dinas Pendidikan Kota Serang

Lampiran 10. Organisasi dan Tata Kerja UPT Pendidikan Pemkot Serang

Lampiran 11. Keputusan BAN PT Tentang Status Akreditasi Program S3 IPDN